



**UPAYA PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA  
PEMALSUAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN  
DI KOTA JAYAPURA**

*(LAW ENFORCEMENT EFFORTS IN THE CRIMINAL ACTION  
OF FORGERING POPULATION DOCUMENTS  
IN JAYAPURA CITY)*

**TESIS**

*Untuk Memenuhi salah satu syarat ujian  
Guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum*

**OLEH**

**KOMANG TRIASTUTI  
NIM. 2021025015020**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS CENDERAWASIH  
JAYAPURA  
2023**

**LEMBAR PENGESAHAN TESIS**

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA  
PEMALSUAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN  
DI KOTA JAYAPURA**

Disusun dan diajukan oleh:

**KOMANG TRIASTUTI**  
**NIM. 2021025015020**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
Guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum

**MENYETUJUI**

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,

  
Dr. Budiyanto, S.H., M.H.  
NIP. 19660124 199303 1 001

  
Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H.  
NIP. 19600713 198903 1 002

Mengetahui  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih






  
  
Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum.  
NIP. 19660302 199303 1 002

**HALAMAN PELAKSANAAN UJIAN**

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA  
PEMALSUAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN  
DI KOTA JAYAPURA**

Telah Diujikan di depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal: 7 Juli 2023

**DEWAN PENGUJI**

Ketua/Anggota	Dr. Budiyanto, S.H., M.H. NIP. 19660124 199303 1 001	 (.....)
Sekretaris/Anggota	Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H. NIP. 19600713 198903 1 002	 (.....)
Anggota	Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum. NIP. 19660302 199303 1 002	 (.....)
Anggota	Dr. Basir Rohrohmana, S.H., M.Hum. NIP. 19641009 199003 1 003	 (.....)
Anggota	Dr. Farida Kaplele, S.H., M.H. NIP. 19830816 200604 2 004	 (.....)

**PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT  
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister, baik di Universitas Cenderawasih maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Jayapura, 3 Juli 2023  
Yang membuat pernyataan,

Komang Triastuti

## ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Kota Jayapura yang difokuskan pada Wilayah Hukum Kepolisian Resor Jayapura Kota, dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut berwenang melakukan penegakan hukum tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan di Wilayah Kota Jayapura. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan didukung oleh penelitian hukum empiris.

Hasil penelitian terungkap bahwa pelaksanaan penegakan hukum oleh aparat kepolisian, kejaksaan dan hakim terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan di Kota Jayapura sudah berjalan sesuai tahapan dalam sistem peradilan pidana. Selama Tahun 2018 hingga Mei 2023 total keseluruhan tindak pidana pemalsuan berjumlah 20 kasus. Kasus pemalsuan dokumen kependudukan dalam bentuk KTP-EL oleh penyidik Polresta Jayapura Kota telah dilakukan tindakan represif berdasarkan atas laporan masyarakat. Pasal yang diterapkan jaksa penuntut umum bukan undang-undang administrasi kependudukan tetapi menggunakan Pasal 263 ayat (1), Pasal 264 ayat (1) ke-1, dan Pasal 266 ayat (1) KUHP dengan tuntutan pidana penjara 3 tahun. Hakim pengadilan negeri menjatuhkan Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Hakim Pengadilan Tinggi bertambah menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan terdakwa mengajukan kasasi tetapi ditolak. Kendala-kendalanya terdiri atas: kendala hukumnya yang masih belum diterapkan secara maksimal oleh hakim pengadilan; keterbatasan personil aparat penegak hukum; ketersediaan sarana dan prasarana masih sangat terbatas; kurangnya pemahaman hukum menyebabkan tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat rendah; dan kurangnya pemahaman dan sosialisasi terhadap hukum sehingga mempengaruhi perilaku masyarakat.

Disarankan kepada aparat penegak hukum agar lebih tegas dalam menindak pelaku pemalsuan dokumen kependudukan dan menerapkan sanksi pidana maksimal sesuai ancaman pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga mampu memberikan rasa takut dan efek jera pelakunya. Kepada masyarakat untuk menjalin kerjasama dengan aparat penegak hukum agar kasus pemalsuan dokumen kependudukan dapat diungkap oleh aparat penegak hukum, sehingga dapat mengurangi angka kriminalitas yang terjadi.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Pemalsuan, Dokumen Kependudukan.

## ABSTRACT

*This research was conducted in the Jayapura City Region which focused on the Jayapura City Police Legal Area, with the consideration that the agency has the authority to enforce the law on the crime of forging residence documents in the Jayapura City Region. The type of research used is normative legal research and is supported by empirical legal research.*

*The results of the study revealed that the implementation of law enforcement by the police, prosecutors and judges against the perpetrators of the crime of falsifying population documents in Jayapura City had proceeded according to the stages in the criminal justice system. During 2018 to May 2023, a total of 20 cases of counterfeiting were committed. The case of falsification of population documents in the form of an KTP-EL by Jayapura City Police investigators has taken repressive measures based on public reports. The article applied by the public prosecutor is not the population administration law but uses Article 263 paragraph (1), Article 264 paragraph (1) 1st, and Article 266 paragraph (1) of the Criminal Code with a charge of 3 years imprisonment. The district court judge sentenced the District Court to impose a prison sentence of 1 (one) year, the High Court Judge increased it to 1 (one) year and 6 (six) months imprisonment, and the defendant filed an appeal but was rejected. The obstacles consist of: legal constraints that have not been maximally applied by court judges; limited personnel of law enforcement officers; the availability of facilities and infrastructure is still very limited; lack of understanding of the law leads to a low level of public awareness and legal compliance; and lack of understanding and socialization of the law so that it affects people's behavior.*

*It is suggested to law enforcement officials to be more assertive in taking action against the perpetrators of falsification of population documents and to apply maximum criminal sanctions in accordance with the criminal threats stipulated in laws and regulations so as to be able to give fear and a deterrent effect to the perpetrators. To the public to establish cooperation with law enforcement officials so that cases of falsification of population documents can be uncovered by law enforcement officials, so as to reduce the number of crimes that occur.*

*Keywords: Law Enforcement, Forgery, Population Documents.*

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**Motto:**

”Menjadi orang yang bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya umat manusia”.

(Komang Triastuti)

Tesis ini dengan tulus ikhlas kupersembahkan kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tersayang;
2. Suamiku Royal Sitohang tercinta dan Anak-anak ku tersayang;
3. Almamater Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

## **KATA PENGANTAR**

Syukur dan kemuliaan hanya kehadiran Tuhan Maha Pengasih, berkat rahmat dan karuniaNya. sehingga Tesis ini dapat dirampungkan dengan baik dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

Penulisan Tesis ini tidak terlepas dari berbagai dukungan serta bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini sepantasnya disampaikan terimakasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Oscar Oswald O. Wambrau, S.E., M.Sc., Agr., selaku Rektor Universitas Cenderawasih, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Cenderawasih.
2. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih dan sekaligus Dosen Pembimbing II atas segala kebijakannya sehingga penulis dapat menempuh studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Cenderawasih.
3. Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum., selaku Ketua Prodi S2 Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II, yang telah membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis dari awal sampai rampungnya tesis ini.

4. Dr. Budiyanto, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing I, yang telah membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis dari awal sampai rampungnya tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Cenderawasih yang telah membekali penulis dengan ilmu hukum selama menempuh studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Cenderawasih.
6. Bapak dan Ibu Staf Administrasi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Cenderawasih atas segala pelayanan administrasi yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Cenderawasih.
7. Suamiku Royal Sitohang tercinta serta anak-anak ku tersayang yang telah memberikan semangat dan doanya sehingga terselesaikannya tesis ini.
8. Rekan se-angkatan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Cenderawasih, yang turut memberikan dorongan moril kepada penulis hingga selesainya penulisan tesis ini.
9. Seluruh pihak yang telah berturut serta membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, yang tidak penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala pengorbanan, dorongan dan bantuan tersebut mendapat balasan kebaikan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kritik dan saran konstruktif senantiasa penulis terima demi perbaikan tesis ini.

Jayapura, Juni 2023

Penulis,

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PELAKSANAAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian .....	8
F. Kerangka Pikir .....	11
<b>BAB II           LANDASAN TEORI</b>	
A. Teori Negara Hukum.....	12
B. Teori Penegakan Hukum.....	27
C. Teori Tujuan Hukum.....	32
D. Pengertian Tindak Pidana .....	50
E. Ketentuan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam KUHP .....	54
F. Ketentuan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dokumen Kependudukan.....	68
<b>BAB III          HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Oleh Aparat Kepoli- sian, Kejaksaan dan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Kependudukan di Kota Jayapura.....	74
B. Kendala-kendala Yang Dihadapai Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Kependudukan di Kota Jayapura .	99

<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	115
	B. Saran .....	116
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		117